



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 16
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 6 September 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.20 WIB s.d 13.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V); Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022; 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2023.
Ketua Rapat	: H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: ... Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, kementerian Desa PDT & Transmigrasi beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai Bulan Agustus 2022 dan membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2023.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut:

NO.	UNIT ORGANISASI	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
1.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	35,96%	38,65%
2.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	31,15%	31,65%
3.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	44,85%	48,84%
4.	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	41,54%	46,63%

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Dalam ribuan rupiah

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU KEBUTUHAN TA 2023	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2023	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2023	SELISIH
		A	B	C	A-C
1.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	1.814.685.160	229.216.528	234.356.528	1.580.328.632
2.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	487.384.248	211.470.248	230.459.248	256.925.000
3.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	207.976.634	93.628.634	90.564.634	117.412.000
4.	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	422.652.143	258.286.559	251.553.559	171.098.584

3. Komisi V DPR RI bersama Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 6 September 2022

KETUA RAPAT,



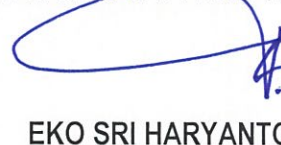
ANDI IWAN DARMAWAN ARAS

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



SUGITO

DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



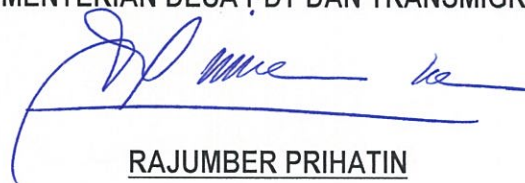
EKO SRI HARYANTO

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



HARLINA SULISTYORINI

Pit. DIRJEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



RAJUMBER PRIHATIN